

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA/UNIT ORGANIS : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	PROSEN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
I					
Program Dukungan Manajemen (076 WA)					
		1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegawaian dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan lembaga riset kepegawaian	-	85%
		2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	-	80%
		3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	-	90%
		4. Terwujudnya data Pemilih secara Berkelanjutan di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Persentase KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang memutakhirkan data Pemilih tepat waktu	-	66%
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	B	-
			2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	WTP	-
			3. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	-	77%
1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi					
		1. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu di Dalam Negeri dan diluar Negeri	Jumlahnya kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	4 Kegiatan	
		2. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi Anggaran yang dilakukan terkait dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan	6 Kali	
		3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	1. Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran KPU Tahun 2022 yang akuntabel dan tepat waktu.	-	85%
			2. Persentase KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang Target Kinerjanya sesuai dengan Perianilan Kinerja	-	95%
			3. Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan Tepat Waktu	-	85%
		4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Persentase KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapatkan Nilai Minimum B untuk penilaian mandiri RB.	-	90%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	PROSEN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
2. Penilaian Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
		1. Meningkatnya tertib Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan Kepegawaian yang tepat waktu 2. Persentase Pegawai yang mendapatkan Penegakkan Disiplin	-	95% 90%
		2. Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan	1. Persentase Layanan Pengadaan Pegawai dengan Metode Evulasi Kinerja secara Transparan dan akuntabel 2. Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) dengan Perjanjian Kontrak Kerja sesuai Peraturan yang berlaku.	-	85% 90%
		3. Tersedia Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi	-	80%
		4. Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan /Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 Rancangan	-
		5. Tersedianya Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsioani sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undang yang berlaku.	Persentase Pegawai Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsioani sesuai dengan Peraturan dan Perundang - Undang yang berlaku.		85%
		6. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoek untuk Pemilu	Jumlah Badan Ad Hoek yang disiapkan sebagai Penyelenggara untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.	1 Kab.	-
3 Pelaksanaan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara					
		1. Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan yang terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase Pejabat Bendahara yang menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) sesuai dengan Ketentuan.		95%
		2. Terlaksananya Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	4 Laporan	-
		3. Tersusunnya Juknis Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	Jumlah Laporan Sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	-
		4. terselesaiannya Permasalahan tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	Jumlah Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan dapat diselesaikan	-	80%
		5. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase KPU Kabupaten yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang berbasis SIMONIKA tepat waktu dan Valid	-	90%
		6. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang yang berlaku	1. Persentase Dalam mengelola Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang yang berlaku	-	85%
			2. Persentase Dalam mengelola Laporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang yang berlaku	-	90%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	PROSEN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana				
		1. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsipan	1. Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten tentang kearsipan yang disusun 2. Persentase KPU yang mengelola Arsip sesuai dengan aturan kearsipan	1 Rancangan-an -	v 84%
		2. Terwujudnya Dukungan Sarana Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas	1. Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kelancaran Tugas Pegawai yang berfungsi dengan baik 2. Persentase Fasilitas untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik 3. Persentase Gedung dan Gudang KPU dapat berfungsi dengan baik	- - -	95% 100% 100%
		3. Meningkatnya Layanan Persidangan dan Protokol	1. Persentase Ruang Rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat 2. Persentase Ruang Rapat yang digunakan sesuai dengan ketentuan Portokol Kesehatan dan Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti 2 s/d 4 hari kerja	- -	90% 85%
		4. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten terkendali aman dan tertib	-	100%
		5. Terwujudnya Dukungan Sarana Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten	1. Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kelancaran Tugas Pegawai, Fasilitas Kantor untuk Pegawai dan APD Pencegah Covid 19 Terpenuhi	-	100%
		6. Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai dan Tunjangan Pegawai	Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan Pembayaran Gaji Pegawai dan Tunjangan Pegawai tepat waktu.	-	95%
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan				
		1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Persentase Pemeriksaan terhadap temuan yang diturunkan atas Hasil Pemeriksaan Internal KPU terkait dengan Realisasi Anggaran.	-	45%
		2. Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggara SPIP KPU Kabupaten	Persentase Nilai Penyelenggara SPIP KPU Kabupaten	4,4	
		3. Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas dan Sistem Pengendalian Internal KPU	Persentase Nilai Kapilitas APIP	-	90%
		4. Terwujudnya Penyelenggara Pemerintah yang bersih dan berwibawa	Persentase Pemerintah yang terkait dengan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.	-	85%
		5. Meningkatnya Manfaat Hasil Pengawasan :BPK,BPKP dan APIP KPU dalam Pencapaian Tujuan KPU	Persentase Hasil Pengawasan terhadap Penyelesaian Rekomendasi BPK,BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	-	80%
		6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal 8.	-	78%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	PROSEN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		7. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di lingkungan KPU	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WKB/WIBM	-	95%
6.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan				
		1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU	1. Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompentensi.	25 Orang	-
			2. Jumlah PNS KPU KPU yang Lulus S2 Program Study Tata Kelola Pemilu maupun Program Study Prioritas KPU lainnya (IT,Hukum,Akuntansi berdasarkan jadwal		
		1. Terwujudnya Kajian Litbang Riset dan Jurnal Kepemiluan	1. Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	-
			2. Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	-
II	PROGRAM PENYELENGGARA PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (076.cq)				
		1. Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasi Informasi Hukum dan Penyuluhan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	-	100%
		2. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.	-	100%
		3. Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan sesuai jadwal	1. Persentase Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilih	-	95%
			2. Tersusunnya laporan dan Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	-	-
1.	Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan				
		1. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	1. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan regulasi	-	100%
			2. Persentase Rancangan Keputusan yang terkait dengan tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	-	90%
		2. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum	1. Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.	-	95%
			2. Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	-	93%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	PROSEN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
2.	Dukungan Bantuan Hukum				
		Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	1. Penurunan Jumlah Sengketa Hukum dalam Perkara Perselisian Sengketa Hukum	4 Perkara	-
			2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	1 Perkara	-
3.	Pelaksanaan Teknis Tahapan Pemilu/Pemilihan dan PAW				
		1. Terwujudnya Penyelenggara Pemilu /Pemilihan sesuai jadwal Tahapan Pemilu	1. Persentase KPU Kabupaten yang Menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	-	90%
			2. Persentase KPU Kabupaten yang Memutakhirkan Data Wilayah /Pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024	-	100%
		2. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	100%
		3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat di fasilitasi	Sather KPU	
		4. Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan untuk Pemilu /Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan untuk Pemilu /Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Darf	-
		5. Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye , Verifikasi Partai Politik dan/atau Calon Dukungan Anggota Perorangan DPD	Jumlah Dokumen SOP atau Petunjuk Teknis untuk Laporan dan Audit Dana Kampanye , Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu /Pemilihan.	1 Dokumen	-
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggara Hubungan Masyarakat				
		1. Pengelolaan Rumah Pintar	1. KPU Kabupaten yang telah membentuk Pendidikan Pemilih	1 Satker KPU,	
			2. Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan Sistem Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 Satker KPU,	
		2. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1. Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi kepada Masyarakat Umum	-	100%
		3. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula ,Perempuan dan Disabilitas	1. Persentase Satker KPU Kabupaten yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	-	90%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	PROSEN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			2. Persentase Satker KPU Kabupaten yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	-	100%
			3. Persentase Satker KPU Kabupaten yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	-	95%
		4. Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik /bencana	1. Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan dan Daerah Rawan Konflik /bencana dan Daerah yang partisipasi Masyarakat rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.	-	95%
		5. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta akurat	1. Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	-	95%
			2. Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 5 media Sosial	-	95%
			3. Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia Publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	-	100%
		6. Terlaksananya Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakholder (Partai Politik, LSM, Ormas Pemerintah Daerah Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.	Kabupaten	-
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik				
		1. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Data, Kebutuhan Data, Pengadaan, Pendistribusian serta pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	1. Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggara Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik		90%
			2. Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pengadaan Logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan Uang Negara		90%
			3. Persentase KPU Kabupaten yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu		100%
			4. Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisasi dan memelihara Logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu/Pemilihan.		100%
		2. Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	1 Satker KPU.	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	PROSEN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		3. KetersediaanSuara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Hasil Pemilu	1 Satker KPU.	95%
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
		1. Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-Government KPU	1. Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan		85%
			2. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk sistim informasi aman, handal dan lancar		100%
			3. Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi.		95%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	Program Dukungan Manajemen	
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1.613.794.000
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	363.102.000
3.	Data dan Informasi	34.220.000
	Jumlah	2.011.116.000



PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA
SIMON BILL DAPAWANDO
NIP.19740122 200112 1 005

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
 TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	PROGRAM	BASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET	
				VOLUME	PROSES	T1			T2			T3			T4				
						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
Program Kekayaan Manusia (7% WA)																			
		1. Terlaksananya kegiatan lembaga riast kependudukan dan persampulannya	Persentase Fasilitas kerjanya KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan lembaga riast kependudukan	-	85%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		2. Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeter	Persentase kemampuan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi pesugelannya	-	80%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		3. Terselenggaranya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan keterampilan tugas KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang Berlingkup dengan baik	-	80%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		4. Terselenggaranya data Pemeliharaan Berkelanjutan di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Persentase KPU Kabupaten KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang memelihara data Pemeliharaan tepat waktu	-	80%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		5. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	1. Nilai Evaluasi atau Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	8	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
			2. Opini BPK atau Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	WTP	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			3. Nilai Evaluasi atau Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	77%	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi																			
		1. Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu di Dalam Negeri dan Luar Negeri	jumlahnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Kegiatan Kemandirian	4 Kegiatan		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

NO	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET				
				VOLUME	PROSES	T1				T2				T3					T4			
						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7				-8				-9				-10				-12
		2. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi Anggaran yang dilakukan terkait dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan	0 KGD		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Perencanaan, Data dan Informasi		
		3. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang terah, efektif dan efisien	1. Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan Anggaran KPU Tahun 2022 yang akurat dan tepat waktu 2. Persentase KPU Kabupaten KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang Target Keatjaya sesuai dengan Perjanjian Kinerja 3. Persentase Dokumen RKP yang terah dengan Tepat Waktu	-	80%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Perencanaan, Data dan Informasi			
		4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Persentase KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapatkan Nilai Maturity B untuk penilaian ready to BB	-	80%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Perencanaan, Data dan Informasi			
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Administrasi Kepegawaian																						
		1. Meningkatkan terah Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Persentase Pegawai yang mendapatkan laporan Kepegawaian yang tepat waktu 2. Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengakuan Stabilitas	-	90%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Rubrik dan SDM			
		2. Terlaksananya Layanan Pengaduan Pegawai secara Transparan	1. Persentase Layanan Pengaduan Pegawai dengan Metode Evaluasi Kinerja secara Transparan dan akurat 2. Persentase Pegawai Penerimaan Non Pegawai Negeri (PPNM) dengan Perjanjian Kinerja sesuai Peraturan yang berlaku	-	80%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Rubrik dan SDM			
		3. Terah Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi	-	80%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Rubrik dan SDM			
		4. Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan dan/atau Kebijakan Bidang Kepegawaian	-		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Rubrik dan SDM			

NO	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET
				VOLUME	PROSEN	T1			T2			T3			T4			
						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
-1	-3	-3	-4	-5	-6	-7			-8			-9			-10			-12
		3. Terselainya jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pegawai Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku		85%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Rukun dan SDM
		4. Penunjukan Badan Penyelenggara Ad Hoc untuk Pemilu	Jumlah Badan Ad Hoc yang ditunjuk sebagai Penyelenggara untuk Pemilu Serentak Tahun 2024	1 Kab.	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Rukun dan SDM
3. Pelaksanaan Fungsi dan Ruang Lingkup																		
		1. Melaksanakannya Penilaian Performansi yang terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengurusan Anggaran (LPPA)	Persentase Pejabat Bawah yang menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurusan Anggaran (LPPA) sesuai dengan ketentuan		95%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Keuangan, Umum dan Logistik
		2. Terlaksananya Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan	4 Laporan	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Keuangan, Umum dan Logistik
		3. Terselainya Jalur Pengalihan Anggaran di Lingkungan KPU	Jumlah Laporan Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Keuangan, Umum dan Logistik
		4. Terselainya Penyalahan tugas Pengalihan Anggaran di Lingkungan KPU	Jumlah Permintaan dalam Pengalihan Anggaran dapat diselesaikan	-	85%				*				*					Keuangan, Umum dan Logistik
		5. Terselainya Laporan Pertanggungjawaban Pengurusan Anggaran (LPPA)	Persentase KPI Kabupaten yang menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurusan Anggaran (LPPA) yang berlaku SKM/DKRA tepat waktu dan Valid	-	90%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Keuangan, Umum dan Logistik
		6. Terselainya Pengalihan Ruang Lingkup Negara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang yang berlaku	Persentase Dalam mengolah Laporan Ruang Lingkup Negara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang yang berlaku	-	85%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Keuangan, Umum dan Logistik
			Persentase Dalam mengolah Laporan Ruang Lingkup Negara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang yang berlaku	-	90%			*				*				*		Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET
				VOLUME	PROSES	T1			T2			T3			T4			
						JAN	FEB	MAR	APR	MES	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7			-8			-9			-10			-12
4. Peningkatan Operasional dan Peningkatan Performansi (NPI) serta Disiplin																		
		1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persyaratan dan Pengiriman Arsip	1. Jumlah Revisi dan Keputusan KPU Kabupaten tentang surat yang ditinjau 2. Persentase KPU yang memiliki Arsip sesuai dengan standar kearsifan	1 Revisi-an -	-													Kewangan, Umum dan Logistik
		2. Tersedianya Dukungan Sarana Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugast	1. Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kelancaran Tugast Pegawai yang berfungsi dengan baik 2. Persentase Fasilitas untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik 3. Persentase Gedung dan Gedung KPU dapat berfungsi dengan baik	-	90%													Kewangan, Umum dan Logistik
		3. Meningkatnya Layanan Perihal dan Protokol	1. Persentase Ruang Rapat yang digunakan tidak ada yang bersaman dalam waktu dan tempat 2. Persentase Ruang Rapat yang digunakan sesuai dengan ketentuan Protokol Kesehatan dan Hasil Rapat Pleno yang dilaksanakan 2x/4 hari kerja	-	90%													Kewangan, Umum dan Logistik
		4. Tersedianya Rencanan dan Keterlibatan Organisasi KPU Kabupaten	Persentase Gangguan Rencanan dan Keterlibatan Organisasi KPU Kabupaten terencana aman dan tertib	-	100%													Kewangan, Umum dan Logistik
		5. Tersedianya Dukungan Sarana Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugast KPU Kabupaten	1. Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kelancaran Tugast Pegawai Fasilitas Kantor untuk Pegawai dan APD Perangkat Cerdas IT Terpadu	-	100%													Kewangan, Umum dan Logistik
		6. Terlaksananya Pembayaran Gad Pegawai dan Tunjangan Pegawai	Persentase Saluran Saru yang melaksanakan Pembayaran Gad Pegawai dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	-	95%													Kewangan, Umum dan Logistik
Penerapan dan Pengawasan																		

NO	PROGRAM	BASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET	
				VOLUME	PROBES	T1			T2			T3			T4				
						JAN	FEB	MAR	APR	MU	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-10	-12									
		1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPI	Persentase Pemertanian terhadap temuan yang diturunkan atau hasil Pemeriksaan Internal KPI terkait dengan Realisasi Anggaran	-	40%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Hakim dan SDM
		2. Meningkatkan Peningkatan Penyelenggara SPK KPI Kabupaten	Persentase Nilai Penyelenggara SPK KPI Kabupaten	4,4		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Hakim dan SDM
		3. Meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawas dan Sistem Pengendalian Internal KPI	Persentase Nilai Kapasitas APF	-	90%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Hakim dan SDM
		4. Terselenggaranya Penyelenggara Pemertanian yang bertitik tolak berwujud	Persentase Pemertanian yang terkait dengan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	-	80%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Hakim dan SDM
		5. Meningkatkan Monev Hasil Pengawasan BPK/PPSP dan APF KPI dalam Pencapaian Tujuan KPI	Persentase Hasil Penyelidikan Rekomendasi BPK/PPSP dan APF yang ditindaklanjuti	-	80%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Hakim dan SDM
		6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPI	Persentase KPI Kabupaten/Kota yang mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B	-	70%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Hakim dan SDM
		7. Meningkatkan Keunggulan dan Kinerja di lingkungan KPI	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WSR/WSBM	-	90%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Hakim dan SDM
6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan																			
		1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) KPI	1. Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlengkap	25 Orang	-	*	*	*					*	*	*	*		Hakim dan SDM	
			2. Jumlah PNS KPI KPI yang Lulus S2 Program Study Tata Kelola Pemerintahan maupun Program Study Pasca Sarjana KPI lainnya (IT, Akuntansi, kehumasan, jember)					*	*	*					*	*	*	*	
		2. Terselenggaranya Kajian Litbang Ekst dan Jurnal Berachon	1. Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 kegiatan	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		Hakim dan SDM

NO	PROGRAM	BASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET
				VOLUME	PROSES	T1			T2			T3			T4			
						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7			-8			-9			-10			-12
			2. Persentase Informasi Produk Hukum yang diadopsi secara tepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	-	99%				*	*	*	*	*	*	*	*	*	Hukum dan SDM
2. Dukungan Bantuan Hukum																		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sengketa dan Pelayanan Perlinhagan Hukum	1. Penurunan Jumlah Sengketa Hukum dalam Perkara Peradilan Sengketa Hukum	4 Perkara	-				*	*	*	*	*	*	*	*	*	Hukum dan SDM
			2. Persentase Sengketa Hukum yang ditangani KPU	1 Perkara	-				*	*	*	*	*	*	*	*	*	Hukum dan SDM
3. Peningkatan Teknis Tahapan Pemilu, Pemilihan dan PAM																		
		1. Terwujudnya Penyelenggara Pemilu /Pemilihan sesuai jadwal Tahapan Pemilu	1. Persentase KPU Kabupaten yang Menetapkan Jadwal Tahapan dan Penunjuk Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	-	98%				*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan SIPMAD
			2. Persentase KPU Kabupaten yang Menstabilkan Data Wilayah /Pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Serentak Tahun 2029	-	100%				*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan SIPMAD
		2. Terlaksananya layanan administrasi PAM tepat waktu dan sesuai standar	Persentase proses PAM anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	100%				*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan SIPMAD
		3. Peningkatan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat di lindungi	Sesuai KPU					*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan SIPMAD
		4. Terwujudnya Rancangan Pedoman Daerah dan Tanggapan Kebutuhan untuk Pemilu /Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Daerah dan Tanggapan Kebutuhan untuk Pemilu /Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Darf	-				*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan SIPMAD

NO	PROGRAM	BASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET
				VOLUME	PROSES	T1			T2			T3			T4			
						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7			-8			-9			-10			-12
		5. Tersediaya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Calon Calon dengan Angka Perolehan DPT	Jumlah Dokumen SOP atau Petunjuk Teknis untuk Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Calon dengan Calon Perolehan yang dibuat sesuai dengan Tahunan Pemilu /Pemilihan	1 Dokumen	-				*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan HIMPAS
4. Peningkatan Kualitas Masyarakat dan Penyelenggara Kabupaten Mawasika																		
		1. Peningkatan Rumah Pustu	1. KPI Kabupaten yang telah membentuk Pendidikan Pustis	1 Sektur KPU	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan HIMPAS
			2. Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan Sistem Digitalisasi Rumah Pustu Pemilu (SRP)	1 Sektur KPU	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan HIMPAS
		2. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1. Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi kepada Masyarakat Umum	-	100%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan HIMPAS
		3. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	1. Persentase Sektur KPU Kabupaten yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	-	90%	*			*				*				*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan HIMPAS
			2. Persentase Sektur KPU Kabupaten yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	-	100%	*			*				*				*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan HIMPAS
			3. Persentase Sektur KPU Kabupaten yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	-	90%	*			*				*				*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan HIMPAS
		4. Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipan Berhak, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Beracsa	1. Persentase Satuan Kerja KPU Kabupaten Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan dan Daerah Rawan Konflik/Beracsa dan Daerah yang partisipan Masyarakat rendah yang mendapatkan Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi	-	90%	*			*				*				*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan HIMPAS

NO	PROGRAM	BASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		RENCANA PELAKSANAAN												KET			
				VOLUME	PROSES	T1			T2			T3			T4						
						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGR	SEP	OKT	NOV	DES				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7						-8			-9			-10			-12
		5. Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Data yang tepat serta akurat	1. Persentase Pemrosesan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPD sesuai dengan SOP	-	95%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan SIPMAS	
			2. Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 3 media sosial	-	95%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan SIPMAS	
			3. Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditayangkan di media Publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	-	100%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan SIPMAS	
		6. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LDM/Umum Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Pemaparan Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditayangkan di media publikasi	Kabupaten	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Teknis Penyelenggara Pemilu dan SIPMAS	
Pelaksanaan Pengadaan Logistik																					
		1. Terselenggaranya proses pengurusan Data, Keabsahan Data, Pengadaan, Pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	1. Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggara Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik		90%					*										Keuangan/Umum dan Logistik	
			2. Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pengadaan Logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terbalik proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan Uang Negara		90%							*									Keuangan/Umum dan Logistik
			3. Persentase KPU Kabupaten yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu		100%										*						Keuangan/Umum dan Logistik

